

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pakistan menjadi negara yang berdaulat pada tanggal 14 Agustus 1947. Berdirinya Pakistan dilatarbelakangi perlawanan kaum Muslim di Asia Selatan yang ingin memisahkan diri. Ide munculnya negara Pakistan diawali ketika Jenderal muda Muslim, Mohammad bin Qasim menaklukan Sindh pada tahun 1912.<sup>1</sup>

Pada abad ke-18 Inggris mulai menguasai India. Pada saat inilah dibentuk *The Indian National Congress* yang menginginkan pemerintahan atas India yang berpenduduk sekitar 1.098.577.839 dan mayoritas Hindu, walaupun sebenarnya terdapat sekitar 25-30% penduduk Muslim. Reaksi dari penduduk Muslim adalah pembentukan *The All Indian Moslem League* pada tahun 1906. Organisasi inilah yang kemudian menjadi dasar ide negara Pakistan yang terpisah dari India. Sejak saat itu politisi Muslim memfokuskan pada program perlindungan terhadap propinsi-propinsi berpenduduk Islam seperti Sindh, *North West Frontier Province*, Punjab, Baluchistan, Kashmir, dan Bengal.<sup>2</sup>

Ketika Perang Dunia II terjadi yaitu tahun 1939 Partai Kongres meminta kemerdekaan penuh dari Inggris. Pada tahun 1940 di *Lahore Liga Moslem* mencetuskan *Lahore Resolution* yang menginginkan berdirinya negara Muslim

---

<sup>1</sup> "Pakistan", <http://id.wikipedia.org/wiki>, diakses tanggal 20 April 2011.

<sup>2</sup> "All India Moslem League", [http://en.wikipedia.org/wiki/All-India\\_Muslim\\_League](http://en.wikipedia.org/wiki/All-India_Muslim_League), diakses tanggal 6 April 2011.

berdaulat sendiri, terlepas dari India. Visi pemisahan ini kemudian dinyatakan oleh Mohammad Ali Jinnah yang pada akhirnya berdirilah negara Pakistan.<sup>3</sup>

Gangguan keamanan di Pakistan sering dilakukan oleh Taliban. Kebanyakan anggota Taliban dilahirkan di kemah pelarian Pakistan saat penaklukan tentara Uni Soviet, yang saat itu dilindungi oleh Presiden Afghanistan ketika itu yaitu Najibullah. Anggota Taliban selanjutnya telah dilatih dan dibiayai oleh Osama Bin Laden.

Keberadaan Taliban di Pakistan telah meresahkan masyarakat Pakistan. Pemerintah Pakistan merasa kesulitan untuk menghadapi perlawanan Taliban, sehingga mereka membiarkan Mujahiddin menerapkan syariat Islam di wilayah Lembah Swat. Selanjutnya, Taliban telah berkuasa, mengontrol beberapa wilayah di Pakistan dan menerapkan syariat Islam di sana. Pemimpin Taliban, Muhammad Khalil mengatakan bahwa Taliban tengah mempersiapkan penerapan syariah di distrik Buner. Khalil membuat penegasan sebagai berikut "kami segera mendirikan stasiun radio. Kami juga bersiap-siap untuk memegang pengadilan di Buner secepatnya".<sup>4</sup>

Taliban selanjutnya ingin menguasai Mingora pada 2 Mei 2009 yang membuat Zardari memerintahkan pasukan keamanan Pakistan untuk menyerang Taliban. Hari Rabu tanggal 6 Mei 2009, Tentara Pakistan sempat melakukan jeda serangan, untuk memberi kesempatan warga sipil mengungsi dari wilayah

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> "Hanya Turki bisa jadi penengah Suriah – Israel", dalam <http://hileud.com/hanya-turki-bisa-jadi-penengah-suriah-israel.html>, diakses tanggal 5 Februari 2012.

pertempuran. Taliban sendiri sering menggunakan warga sipil sebagai tameng, sehingga menyulitkan aparat Pakistan untuk menyerang.<sup>5</sup>

Warga Mingora, ibu kota Lembah Swat, pada tanggal 7 Mei 2009, terlihat mengungsi dari wilayahnya karena perang yang ada antara militer dan Taliban. Tentara Pakistan terus menyerang kubu-kubu militan Taliban di Lembah Swat. Pesawat-pesawat dan helikopter tempur meluncurkan berbagai bom dan peluru kendali, mendukung pasukan darat dengan serangan artilerinya. Lebih dari 60 orang Taliban terbunuh. Termasuk putera dari Sufi Muhammad, ulama yang memprakarsai kesepakatan damai antara pemerintah dengan kaum Taliban.

Berbagai permasalahan yang dihadapi Pakistan pada akhirnya membuat Zardari dituntut untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Namun tidak semua masalah dapat diselesaikan secara sekaligus. Zardari pada akhirnya memprioritaskan pemulihan bidang keamanan dibandingkan dengan masalah yang lain.<sup>6</sup>

Kerjasama keamanan dilakukan Pakistan, diantaranya dengan Turki. Berkaitan dengan masalah perbatasan Pakistan dan Afganistan, Pakistan melakukan kerjasama dengan Turki. Turki merupakan negara besar di kawasan Eurasia. Luas negara mencapai 780.580 km<sup>2</sup>, dan 1,3% terdiri dari air. Wilayahnya terbentang dari Semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> "Bom Pakistan, 30 Tewas", <http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2008090811044447>, diakses tanggal 5 April 2011.

Balkan di Eropa Tenggara.<sup>7</sup> Turki ibu kotanya berada di Ankara, namun kota terpenting dan terbesar adalah Istanbul.

Turki adalah sebuah republik konstitusional yang demokratis, sekular, dan bersatu. Pada saat kudeta tahun 1980 di Turki, militer merencanakan pemerintah Turki ke dalam sistem politik demokratis. Militer mengumumkan bahwa parlemen dan kabinet telah dibubarkan dan bahwa imunitas para anggota majelis nasional (parlemen) telah diakhiri. Majelis yang beranggotakan 160 orang mengadakan pertemuan pada tanggal 23 Oktober 1981. Anggota majelis diketuai oleh Profesor Orhan Aldikacti. Dihasilkan sebuah draf yang menjelaskan bahwa pusat kekuasaan di tangan eksekutif dan menambah kekuasaan presiden serta dewan keamanan nasional. Pada tahun 1980 an partai Islam mulai berkembang di Turki dan Turki mengarah pada sistem politik yang demokratis.<sup>8</sup>

Tanggal 28 Agustus 2007 di Turki tiga kandidat bersaing memperebutkan kursi presiden. Ketiga orang tersebut adalah Abdullah Gul dari partai AKP, Shobahuddin dari partai nasionalis, dan mantan menteri pertahanan, serta Husain Thoyafun dari partai sosialis. Gul mendapatkan suara mayoritas mutlak yaitu 339 suara dari total suara 550 anggota parlemen Dia menyingkirkan dua pesaingnya, Shobahuddin yang hanya mendapat 70 suara dan Husain Thoyafun 13 suara.<sup>9</sup> Gul pada akhirnya melakukan kerjasama keamanan dengan Pakistan dalam mengatasi Taliban. Hal tersebut membuat penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kerjasama Keamanan Pakistan dan Turki”.

---

<sup>7</sup> ”Turki”, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/turki>, diakses tanggal 5 Januari 2012.

<sup>8</sup> Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik* Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, Hal.228.

<sup>9</sup> “Pemilu kali ini di Turki,” dalam <http://www.forum-politisi.org/berita/article.php?id=464>, diakses tanggal 5 April 2011.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini adalah bagaimana cara kerjasama Pakistan dan Turki dalam mengatasi kelompok Taliban?

## **C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep pemecahan masalah kolektif. Konsep pemecahan masalah kolektif merupakan pemecahan masalah kolektif yang berlangsung secara bilateral maupun multilateral, yang terdiri atas kerjasama antar negara dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara yang melakukan kerjasama. Negara-negara yang melakukan kerjasama sepakat bahwa ada permasalahan bersama yang dihadapi mereka, meskipun masing-masing negara menawarkan pemecahan yang berbeda dan kepentingan yang bersaing pada situasi kedua negara, memandang perilaku satu sama lain sebagai masalah dasar.<sup>10</sup>

Pemecahan masalah kolektif memperhatikan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan memotivasi kerjasama antar dua negara antara lain:

- a. Adanya anggapan Pemerintah negara bahwa suatu permasalahan sama sekali tidak dapat diselesaikan jika tidak ada suatu bentuk kerjasama.

---

<sup>10</sup> William D. Coplin dan Mercedes Marbun, 1992, *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoretis*, Sinar Baru, Bandung, Hal.282-287.

b. Perilaku kerjasama antar negara adalah bahwa penyatuan sumber daya akan menghilangkan penggandaan usaha yang sia-sia serta meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaannya.<sup>11</sup>

Jadi dalam pemecahan kolektif ini memusatkan pada tipe-tipe interaksi dimana para partisipannya terdiri dari dua negara (bilateral) dan menyamakan, mempersepsikan masalah yang sama dan saling interaksi, bekerjasama untuk mengatasi masalah. Pemecahan masalah kolektif diantara negara-negara yang saling bekerjasama dengan menelaah asal mula perilaku masalah, kerjasama bilateral, lingkup kerjasama dan peran politik dalam pemecahan masalah kolektif antar negara.

Pemecahan masalah kolektif merupakan salah satu bentuk *setting* interaksi antar negara. Pada langkah awal negara-negara melakukan proses persepsi bersama terhadap masalah bersama dan baru kemudian memulai langkah pemecahan masalah. Dalam memahami asal mula pemecahan masalah kolektif antar negara perlu melakukan langkah identifikasi terhadap kondisi-kondisi lingkungan yang menciptakan masalah tersebut. Proses identifikasi masalah ini juga sebagai sasaran pemecahan masalah secara kolektif.<sup>12</sup>

Terdapat dua tipe dasar yang melatar belakangi upaya pemecahan masalah kolektif, Tipe pertama menyangkut kondisi-kondisi di lingkungan internasional yang apabila tidak diatur akan menjadi ancaman terhadap negara-negara yang terlibat dalam suatu masalah. Tipe kedua mencakup keadaan sosial, ekonomi, dan politik domestik tertentu yang dapat memberikan konsekuensi luas terhadap

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

sistem internasional sehingga dapat dianggap sebagai masalah internasional bersama.

Secara bilateral, proses untuk menciptakan dukungan dalam pemecahan masalah kolektif tidaklah terlalu rumit. Intinya hanyalah posisi *policy influencers* dan para pengambil keputusan antar negara dalam mengidentifikasi masalah bersama dan menekankan pentingnya kerjasama. Peran *policy influencer*, baik secara bilateral maupun multilateral, meskipun dalam kelompok yang kecil memiliki arti yang sangat penting dalam pemecahan masalah kolektif di antara negara-negara.<sup>13</sup>

Untuk menyelesaikan masalah kolektif, umumnya dilakukan diplomasi. Diplomasi adalah penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara berdaulat. Diplomasi merupakan seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.<sup>14</sup> Diplomasi sangat erat bila dihubungkan dengan hubungan antar negara. Diplomasi merupakan seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain.

Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Tindakan nyata dari politik luar negeri adalah diplomasi negosiasi. Diplomasi negosiasi merupakan tindakan yang diambil dengan melakukan perundingan yang didalamnya terdapat “tawar-menawar”

---

<sup>13</sup> Varma, *Teori Politik Modern*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, Hal.22.

<sup>14</sup> S.L. Roy, *Diplomasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1984, Hal.3.

untuk saling bekerja sama demi mendapat keuntungan yang akan diperoleh pihak-pihak yang melakukan perundingan tersebut.<sup>15</sup>

Pakistan berusaha menggunakan *soft power* yaitu berupa diplomasi dengan Turki untuk bekerjasama dalam menanggulangi masalah keamanan di Pakistan. Prestasi Turki sebagai mediator regional terutama sejak dipimpin oleh pemerintahan partai *Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP)* mulai diperhitungkan oleh negara-negara di kawasan regional Timur Tengah. Popularitas Turki ditunjukkan antara lain sebagai mediator atau penengah beberapa konflik di kawasan Timur Tengah misalnya konflik antara Israel-Suriah. Turki mulai menengahi konflik tersebut pada bulan Mei 2008. Suriah mencari pemulangan dataran tinggi Golan, yang direbut Israel dalam Perang Timur Tengah 1967. Israel menginginkan perjanjian damai termasuk pengakuan diplomatik oleh Suriah dan konsesi politik lainnya. Turki kini telah menjadi kekuatan besar dan berpengaruh yang menjadikannya pemimpin baru di kawasan Timur Tengah dan dunia Islam.<sup>16</sup>

Pakistan mengalami berbagai gangguan keamanan. Adanya gangguan keamanan di Pakistan yang telah meresahkan masyarakat membuat Pakistan pada akhirnya melakukan upaya dalam menyelesaikan masalah keamanan di Pakistan. Hal tersebut dikarenakan Zardari sebagai tokoh utama dalam struktural pemerintahan Pakistan menganggap gangguan keamanan apabila terus berlangsung dapat mengancam eksistensinya sebagai presiden Pakistan.

---

<sup>15</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi IX, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1991, Hal.38.

<sup>16</sup> “Turki Siap Memulai Lagi Peran Penengah Israel – Suriah”, <http://www.antaranews.com/view/?i=1248299127&c=INT&s=TIM>, berita tanggal 23 Juli 2009, diakses tanggal 1 April 2011.



Pakistan merupakan negara yang struktur ekonomi dan politiknya kurang mapan akibat permasalahan keamanan di dalam negeri. Konflik yang dialami Pakistan dengan negara lain pada akhirnya mewujudkan gangguan keamanan, salah satunya adalah gangguan keamanan di wilayah perbatasan Pakistan dengan Afganistan.

Kondisi keamanan yang terganggu akibat konflik Pakistan dan Afganistan tentu saja tidak dapat diabaikan oleh Pakistan sehingga Pakistan berupaya meningkatkan kerja sama keamanan dengan berbagai negara, terutama dengan Turki dan Amerika Serikat serta organisasi internasional. Pakistan sebelumnya tidak memiliki kedekatan hubungan dengan negara Turki meskipun kedua negara penduduknya banyak yang memeluk agama Islam.<sup>17</sup>

Penguasaan Taliban terhadap wilayah Pakistan seperti Lembah Swat merupakan kasus yang apabila tidak diatasi dengan segera maka integritas teritorial Pakistan akan terganggu. Selain itu, adanya gangguan keamanan di perbatasan Pakistan dengan Afganistan membuat Pakistan berusaha memperjuangkan faktor keamanan militer negaranya.<sup>18</sup> Adanya kerja sama antara Pakistan dengan Turki diharapkan mampu meminimalisir gangguan keamanan di wilayah Pakistan dan Afganistan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> "Pakistan Harapkan Bantuan IMF", <http://www.kompas.com/kompascetak/htm>, berita tanggal 10 Maret 2009, diakses tanggal 4 April 2011.

<sup>18</sup> "Pelantikan Presiden Bersimbah Darah Bom Bunuh Diri", <http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/07/20002994/pelantikan.presiden.bersimbah.darah.bom.bunuh.diri>, berita tanggal 7 September 2009, diakses tanggal 11 April 2011.

<sup>19</sup> "Zardari Presiden Pakistan", <http://kompas.com/read/xml/2008/09/07/07492824/zardari.presiden.pakistan>, berita tanggal 7 September 2008, diakses tanggal 11 April 2011.

Berdasarkan uraian di atas diketahui Pakistan bekerjasama dengan Turki dalam mengatasi Taliban dilakukan melalui cara kerjasama diplomatik maupun kerjasama keamanan. Kerjasama diplomatik dilakukan dengan melakukan berbagai perundingan serta tukar-menukar informasi berkaitan dengan upaya mengatasi Taliban. Kerjasama keamanan dilakukan dengan pelatihan militer dan pertukaran perlengkapan militer. Kedua cara tersebut dilakukan karena Taliban memang sulit sekali untuk diatasi sehingga perlu kedua cara tersebut.

#### **D. Hipotesa**

Pakistan bekerjasama dengan Turki dalam mengatasi Taliban dengan cara:

1. Kerjasama diplomatik
2. Kerjasama keamanan

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu analisis penelitian yang didasarkan pada data-data yang dikaji atas dasar realitas data yang diperoleh dan yang dipaparkan secara diskriptif.

##### **2. Tehnik Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan disini adalah dengan metode *library research* (penelitian kepustakaan), dimana pengumpulan data diambil dari buku-buku literatur, jurnal penelitian, artikel, maupun berita-berita

yang dimuat dalam berbagai media massa maupun media elektronik yang sesuai dan relevan dengan penelitian ini.

### **3. Tehnik Analisis Data**

Metode penulisan yang digunakan adalah *Analisis Deskriptif*. Menggambarkan situasi yang relevan atas fakta dan data-data untuk dihubungkan antar variabel, menginterpretasikannya dan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

### **F. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang Pakistan melakukan kerjasama keamanan dengan Turki.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan waktu dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi pada tahun 2010 hingga saat ini (2012). Dipilihnya tahun 2010 karena pada tanggal 26 Januari 2010, para pemimpin Turki, Pakistan dan Afghanistan melakukan pertemuan di Turki untuk membahas masalah keamanan perbatasan Pakistan dan Afghanistan. Dipilihnya tahun 2012 agar diketahui pelaksanaan dari kerjasama keamanan kedua negara. Baik sebelum atau sesudah tahun tersebut hanya sebagai penunjang atau sebagai faktor pendukung, selama hal itu masih ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis teliti.

## **H. Sistematika Penulisan**

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Argumen Pokok, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi tentang berbagai gangguan keamanan yang dialami oleh Pakistan.

Di BAB III berisi tentang penjelasan faktor integritas territorial (*territorial integrity*) serta kepentingan keamanan militer (*military security*).

Pada BAB IV akan menjelaskan tentang alasan Pakistan memilih Turki dalam menjalin kerjasama keamanan yaitu berupa prestasi Turki sebagai mediator atau juru damai beberapa konflik di kawasan regional Timur Tengah.

Di BAB V merupakan kesimpulan dari semua bab-bab yang telah disampaikan.